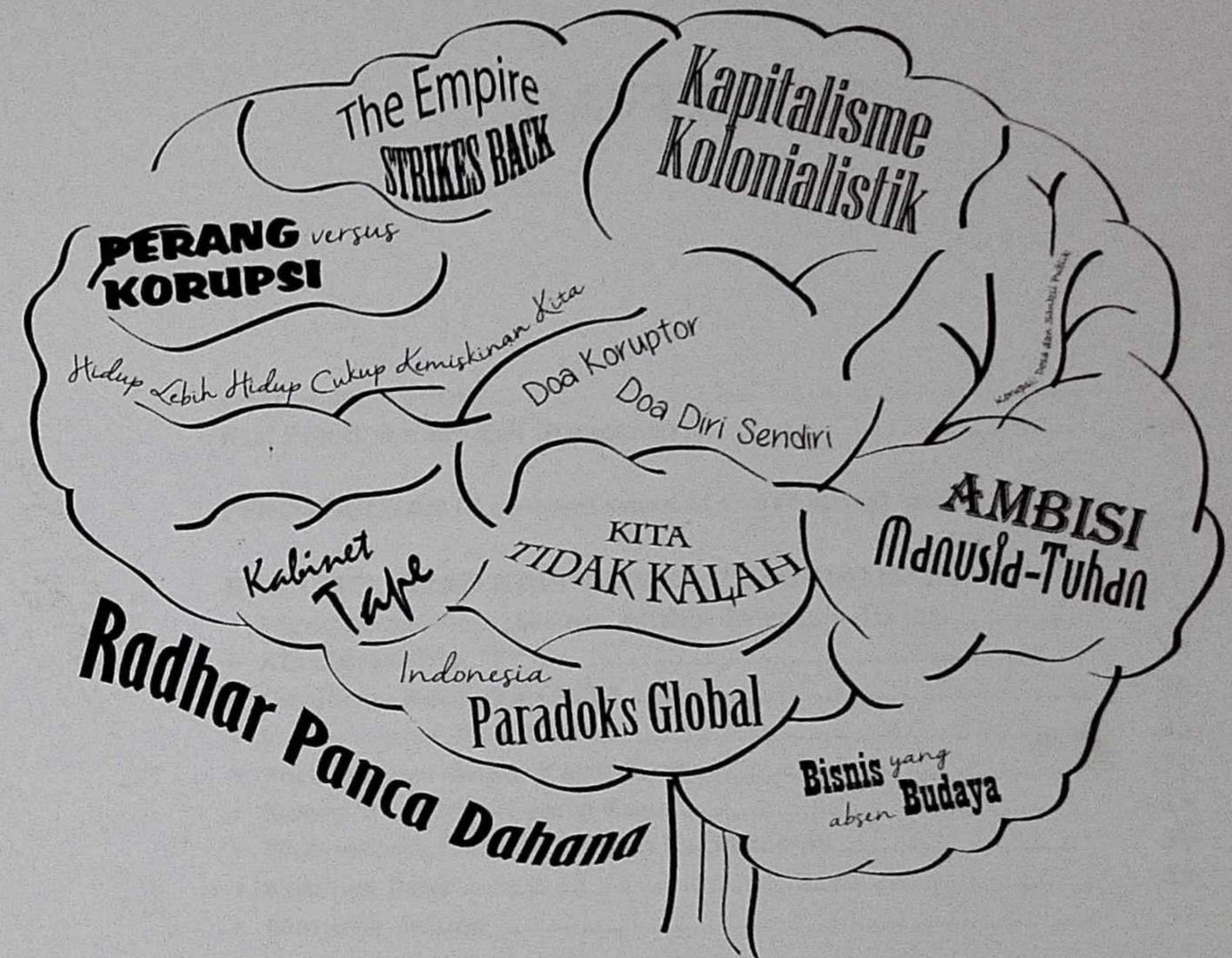


Ekonomi cukup sebuah sistem ekonomi yang berfondasi pada nilai-nilai luhur dan mulia yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan oleh sebuah kebudayaan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Ekonomi Cukup

Kritik Budaya pada Kapitalisme

**EKONOMI CUKUP**— Kritik Budaya pada Kapitalisme  
Copyright © 2015, Radhar Panca Dahana

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh Penerbit Buku Kompas, Maret 2015  
PT Kompas Media Nusantara  
Jl. Palmerah Selatan 26-28  
Jakarta 10270  
e-mail: buku@kompas.com

KMN: 20605150031

Perancang sampul: Wiko Haripahargio

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xxvi + 218 hlm.; 14 cm x 21 cm  
ISBN: 978-979-709-916-9

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia, Jakarta

## DAFTAR ISI

Pengantar Penulis .....	ix
Esai Pembuka <b>Sri-Edi Swasono</b> .....	xiii
<b>PENDAHULUAN</b>   Ekonomi yang Mengkhianati Diri.....	1
<b>BAB I MELAWAN KAPITALISME KOLONIALISTIK</b>	
• Menggugat Kapitalisme: Ambisi Manusia-Tuhan .....	9
• Konspirasi Trio "P" .....	14
• Ganjilnya Kebijakan BBM .....	20
• Kolonialisme Jilid 3: Jasa.....	25
• Perbudakan dalam Kapitalisme .....	30
• Kasus: Ironi Malin yang Kaya .....	35
• Mutualisme Demokrasi dan Kapitalisme.....	39
• Kabinet Tape .....	45
• Manusia Tempe .....	52
<b>BAB II PERANG VERSUS KORUPSI</b>	
• Kita Harus Berperang! .....	57
• Pimpinlah Perang Itu, Jenderal .....	63
• Ketika Pemilu Berbiaya Tinggi .....	69
• Pemborosan Ajaib Itu .....	75
• Monster Hibrid Demokrasi Kapitalistik.....	81
• Korupsi: Dosa dan Sanksi Publik .....	86
• Doa Koruptor, Doa Diri Sendiri .....	93

### **BAB III INDONESIA DALAM PARADOKS GLOBAL**

• Soeharto dan Globalialisasi .....	101
• Final Globalisasi Kebudayaan .....	109
• Kita dalam Permainan Dunia .....	115
• Paradoks Global .....	121
• Tragedi Dunia Janus .....	125
• "The Empire Strikes Back" .....	132
• Arsenal Energi Kita .....	137
• Indonesia Bergerak .....	142
• Belajar dari Negeri Lain .....	146

### **Bab IV Ekonomi Cukup Hidup yang Dicumukupi dan Mencukupi**

• Hidup Lebih .....	155
• Hidup Cukup.....	165
• Kemiskinan Kita .....	171
• Kelas dalam Diri Kita .....	175
• Paradoks Demokrasi Ekonomi.....	181
• Bisnis yang Absen Budaya .....	190
• Arsenal Utama yang Terlupa .....	195
• Ekonomi Cukup Menuju Kedaulatan Ekonomi Indonesia.....	201
Indeks.....	211
Tentang Penulis.....	217

## **PENGANTAR PENULIS**

Tentu saja bukan karena saya menganggap diri ekonom atau pengamat ekonomi, sekurangnya memiliki sedikit formasi akademik di bidang ekonomi, lalu saya "berani" menyusun buku yang berfokus pada perihal ekonomi dari seluruh sisinya. Tidak, tentu saja tidak. Saya tidak berani memandang diri saya sendiri lebih dari sekadar karyawan atau pekerja kebudayaan (istilah yang juga kerap digunakan dalam tahun 1950-an oleh para pelaku seni negeri ini), mungkin persisnya sebagai "kuncen" kebudayaan, yang hanya bermodal sedikit pengetahuan memberanikan diri menjadi penjaga kebudayaan yang memang harus diakui sudah berulang kali mengalami ancaman dan serangan pembunuhan dari berbagai pihak, dalam dan luar negeri. Akibatnya, tidak terlalu jelek, kebudayaan —yang hidup di negeri kepulauan ini— kini kian pendek napasnya, seperti menghadapi sakaratul maut, bahkan sudah mati rohnya, tinggal jasadnya yang hidup bergentayangan, seperti zombi.

Dalam realitas seperti itulah saya bekerja sebagai penjaga kebudayaan. Bagaimana kekuatan yang sebenarnya menjadi fondasi utama dari keberadaan bangsa ini, tetap hidup —betapa pun selai zombi— dan berusaha sekuatnya membangunkan kembali rohnya, jiwa, dan semangatnya yang kini terbang entah di lapis udara atau dimensi apa. Semua hal, bidang kerja atau profesi manusia harus saya telisik untuk dapat melaksanakan tugas di atas. Termasuk menahan atau melawan kekuatan-kekuatan lama dan baru yang tetap menginginkan (kepastian) sudah menjadi mayatnya kebudayaan kita, sehingga budaya mereka dapat merajalela dan menjadi substitusi dari absennya kebudayaan dalam diri kita, secara personal, komunal juga nasional.

Dengan kerangka kerja itulah, saya memasuki dan bekerja cukup dalam di persoalan-persoalan ekonomi, yang dalam hemat saya, adalah bagian tak terpisahkan dalam kerja kebudayaan dari bangsa kita. Bukan hanya karena kerja ekonomi adalah salah satu produk kultural utama dalam masyarakat/bangsa mana pun, tapi juga karena ternyata dalam perkembangan zaman, salah satu produk kebudayaan ini telah mengambil —tepatnya merebut— peran yang sangat signifikan bahkan vital bagi keberlangsungan (daya) hidup sektor atau dimensi hidup sosial-kultural lainnya. Bersama politik, ekonomi saat ini menjadi panglima yang berada di garda depan kebudayaan, bukan hanya sebagai pemilik tongkat komando, tapi menjadi kekuatan dominatif yang membuat elemen-elemen lain tersubordinasi bahkan sekadar menjadi *followers* dari cara berpikir dan cara hidup yang diproduksi oleh kekuatan ekonomi itu.

Dalam perkembangan mutakhir, kekuatan ekonomi itu ternyata telah melakukan semacam proses peleburan atau hibridasi dengan *konco wingking*-nya, politik, membentuk

satu organisme sosial-kultural baru, sebutlah makhluk atau entitas baru itu sebagai Poleko, yang menghadirkan satu gergasi baru dengan kekuatan dan kekuasaan praksis dahsyat dan berkemampuan luar biasa mengisap kekuatan-kekuatan di sekitarnya untuk masuk dalam orbit, pengaruh, atau determinasinya.

Kapasitas ekonomi semacam ini tentu saja memberi dampak yang tidak ringan pada kerja kebudayaan secara umum. Dampak yang menjadi sangat kuat dan cukup mencemaskan ketika kita menghadapi kenyataan ternyata kapasitas ekonomi itu didukung bahkan dibangun oleh sebuah sistem berpikir, sistem berperilaku, hingga sistem bermasyarakat dan bernegara yang terbukti berbeda, bahkan sangat berbeda hingga bersifat diametral, dengan dimensi-dimensi yang sama di tingkat lokal, di tingkat tradisi negeri ini yang sudah berusia bukan lagi ratusan, tapi ribuan tahun.

Karena itulah saya mencurahkan perhatian pada kinerja ekonomi, baik dalam negeri hingga di tingkat trans-nasional, mempelajari asal muasal praksis dan pemikirannya, dasar-dasar paradigmatis dan epistemologisnya, hingga pada landasan (per)adab(an) yang ada di jantungnya. Hasil dari semua itulah yang kemudian terangkum dalam buku ini. Termasuk beberapa “temuan” kecil saya pada praksis dan visi-dunia dari ekonomi khas negeri kepulauan atau bahari yang menjadi identitas purba bangsa kita, Indonesia. Pada bagian akhir, temuan kecil itu saya coba tawarkan menjadi alternatif dari kerja ekonomi kita yang telah sistemik bahkan dianggap *given* belakangan ini.

Untuk kerja itulah saya harus menyampaikan penghargaan dan terima kasih setulusnya pada beberapa pihak, seperti almarhum WS Rendra, penyair yang sesungguhnya juga memiliki gagasan alternatif dalam soal ekonomi, Soegeng Sarjadi dalam diskusi-diskusi di forum yang

diselenggarakannya maupun dalam ruang pribadinya, Sri Edi Swasono, tokoh dan pakar ekonomi yang semangatnya seperti tidak pernah dimakan usia dalam melancarkan koreksi dan kritik pada praksis ekonomi kita saat ini, juga Hendri Saparini, sahabat yang sedia selalu mengiringi pergulatan pemikiran saya di bidang ini.

Di lain ruang tentu saja saya harus menghikmatkan kerja ini kepada orang tua saya, Radsomo dan Suharti (alm.), pada Krisniati Marchellina pendamping semua kesulitan saya dan tiga putra-putri di mana semangat saya selalu berkecambah, teman-teman peserta pengajian saya di Paramadina dan Lebak Bulus yang menjadi semacam laboratorium kecil dari perjalanan pemikiran saya. Hingga akhirnya kepada Mulyawan Karim dan Penerbit Buku Kompas yang mau berendah hati menerbitkan buku ini. Semoga semuanya memberi maslahat bagi kita semua. ☺

Untuk M. Dr. Saheer Noor  
dan sahabat-sahabat dosen  
FE-UST.

## ESAI PEMBUKA

Sri-Edi Swasono\*

Suud  
April 2015

Sebagai seorang pengajar ilmu ekonomi, khususnya pada mata kuliah Sistem Ekonomi, saya menyambut dengan gembira hadirnya buku karya seorang budayawan Radhar Panca Dahana (RPD) yang berjudul *Ekonomi Cukup: Kritik Budaya pada Kapitalisme*. Buku ini menarik untuk dibaca bab demi bab. Lebih dari itu buku ini perlu dibaca oleh para dosen ilmu ekonomi yang masih saja tekun menyebarkan *capitalistic mainstream neoclassical economics* di ruang-ruang kelas. Harapan saya buku ini dapat mengubah ortodoksi kurikulum konvensional yang lebih mengetengahkan “daulat modal” dan “daulat pasar” daripada mengutamakan “daulat rakyat”.

**B**ila para ekonom mempelajari, memahami, dan menerima serta kemudian mewajarkan berlakunya pasar-bebas (*laissez-faire*) di ruang-ruang kelas sebagai stelsel ekonomi

\* Guru Besar Universitas Indonesia, Ketum Majelis Luhur Tamansiswa

yang diwajarkan, sebagai gospel mapan yang *taken for granted*, maka RPD dalam bukunya ini dengan gigih berusaha memahaminya dari segi kultur kemudian menolak *laissez-faire* karena ketidakmanusiawinya, sarat dengan pedoman materialisme, mengetengahkan nafsu dominatif dengan semangat berkompetisi dan berkelahi untuk menang, munafik serta tidak peduli terhadap tuntutan keadilan.

Tentulah bisa dipahami RPD masygul hingar-bingar mempertanyakan di mana budaya “kerja sama” (*co-operativism*) yang hidup dan menghidupi bangsa kita, yang jelas berlawanan dengan “persaingan”. Mengapa pula (yang dengan bahasa saya) *laissez-faire* stelsel dengan semangat persaingan bebas *à la free-fight liberalism*, yang saling menggugurkan para petarung, dipelihara dalam sistem ekonomi Indonesia yang dasar budayanya adalah paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*) ini?

Sebaliknya, saat ini di ruang-ruang kelas konvensional diperkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru sistem ekonomi kapitalisme yang mengagungkan kompetisi (bahkan *perfect competition* dan *pure competition*) sebagai syarat untuk mencapai ekonomi yang efisien, sebagai kaidah dogmatik ilmu ekonomi. Barangkali di sinilah saya harus menjawab ratusan pertanyaan “mengapa”, antara lain mengapa kapitalisme modern menggasak apa saja untuk dijadikan *opportunities*, kreatif rakus melalui *particulier initiatief, nggragas* merambahi segala kesempatan ekonomi yang sejak zaman penjajahan telah diwaspadai menampilkan tendensi menyingkirkan (*Ausschaltungstendenz*) dan tendensi predatorik (*Einschaltungstendenz*) terhadap perekonomian rakyat, bahkan kemudian betul-betul memangsa ekonomi rakyat (*Daulat Ra'jat*, 1933), yang melampaui

batas-batas mekanisme ekonomi, yang menghalalkan tujuan dengan kekerasan, bahkan dengan kekuatan-senjata melakukan penaklukan dan perampokan kedaulatan – *conquer and conquest*, yang di balik itu adalah kepentingan kapitalisme imperialistik. Demikian seharusnya diartikan bahwa penegakan transformatif *mindset* kapitalisme adalah *a battle of sovereignty*. Itulah sebabnya, tanpa mengaitkan dengan pesan ekonomi dalam Konstitusi kita, penulis buku ini menguak di sana-sini semangat nasionalisme ekonomi.

Dikemukakan pula RPD tentang tidak logis dan tidak manusiawinya kapitalisme, tetapi mengapa pula para pemimpin Indonesia memelihara neoliberalisme yang dasar hidupnya kapitalisme. Dari sinilah saya dapat ikut merasakan membenaran bahwa para elite bangsa ini, terutama sejak awal era Reformasi, telah lengah-budaya (baca: absen-budaya, sesuai istilah RPD), menjauh dari *the culture of excellent* – ibarat manusia tapé tanpa menyandang keadiluhungan budaya kemartabatan bagi rakyat dan bangsanya sendiri.



TIDAK banyak yang mau mencoba memahami bahwa sebenarnya pernyataan kemerdekaan tidak saja merupakan “pernyataan ideologis”, “pernyataan keberdaulatan”, atau pun “pernyataan kemandirian”, tetapi lebih utama dari itu adalah “pernyataan budaya”.

Sebagai “pernyataan budaya” kemerdekaan melahirkan berbagai “tuntutan budaya”. Setelah kita menyatakan Kemerdekaan Indonesia, kita tidak berhasil memenuhi tuntutan budaya untuk mampu bersikap dan bertindak sebagai “tuan di negeri sendiri”, tidak mampu melakukan *unlearning* untuk meninggalkan sikap minder sebagai “hamba” terhadap “*ndoro toean*”.

Pernyataan budaya itu terkait dengan kapitalisme yang cenderung memelihara budaya ekonomi subordinasi, yaitu hubungan ekonomi "tuan-hamba", *taoké-koelié* atau "majikan-buruh" yang non-emansipatif. Sistem dagang VOC, *Cultuurstelsel* dan kapitalisme Agrarische Wet 1870 adalah lahan-lahan pelaksanaan sistem ekonomi subordinatif-diskriminatif yang telah mencetak *mindset* ketertundukan ekonomi berkepanjangan.

Bertolak dari tuntutan budaya untuk memenuhi pernyataan budaya ini, RPD memberikan kritik budayanya lebih jauh daripada sekadar kritiknya terhadap kapitalisme yang dipelihara di Indonesia, tetapi juga terhadap *absurd*-nya mutu pemimpin dan kaum elite kita yang ia ibaratkan sebagai *peuyeum*. Bertolak dari situ, maka tidak salahlah kalau kita berkesimpulan bahwa kasus bangsa ini adalah "kasus budaya", kasus karakter penuh ambivalensi, mengemban *minderwaardigheidscomplex* atau *under-dog mentality*. Dulu kita pernah berani melawan, kita merdeka sambil belajar berperang dan sempat memenangkan berbagai pertempuran. Tentulah kita boleh heran mengapa sekarang tiba-tiba saja kita suka kalah dan menyerah. Untuk itulah pengarang buku ini menegaskan bahwa persoalan dasar ekonomi kita lebih pada "apakah pemimpin kita mampu menghindari tekanan global, dari hasil perselingkuhan dari para kapitalis global, mampukah pemimpin kita menciptakan sebuah kekuatan dahsyat yang bernama Sinergi Indonesia", yang artinya kita perlu sadar budaya untuk bersama-sama ber-*rawé-rawé rantas malang-malang putung* menegakkan kedaulatan dengan kemandirian.

Barangkali masih menarik untuk melihat "kasus budaya" sebagaimana dikemukakan di atas, yang berawal dari suatu *trade-mark* bangsa ini dalam wujud ciri-ciri negatif bangsa ini sebagaimana diungkap oleh Koentjaraningrat, Mochtar

Lubis, Roeslan Abdulgani misalnya, dengan beberapa tambahan pendapat pribadi yang dipetik dari berbagai dialog, antara lain sebagai berikut: tidak *achievement oriented* tetapi *status oriented*, berorientasi pada masa lalu, bergantung diri pada nasib, konformis, takut menerobos pakem, berorientasi pada atasan, meremehkan mutu dan suka nerabas (tidak teliti dan sistematis), tidak percaya pada diri sendiri, tidak berdisiplin, suka mengabaikan tanggung jawab, munafik, feodal, percaya pada takhayul, berwatak lemah (terutama lemah terhadap uang), tidak hemat (boros), kurang ulet, terlalu fleksibel, hidup manja (santai), kurang inovatif, kurang waspada (gampang merasa aman), suka sok kuasa (kleptokrat, haus kekuasaan), mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, tidak *zakelijk*, kurang membedakan yang formal dan yang informal, mengemban sikap hidup miskin, berlagak ramah (*friendly*) padahal sebenarnya menghamba (*servile, minderwaardig*), berlagak wajar-diri (*low profile*) padahal sebenarnya adalah lemah (*soft*) - Swasono, 2004. Bahkan RPD sendiri dalam buku ini mengkoine istilah ciri budaya pemerintahan kita sebagai bermental "kalah", tak mampu berbuat apa-apa ketika potensi budaya bangsa ini "dirampok". Tentulah hal begini memalukan karena kita sebenarnya memiliki nilai patriotik "*sedumuk bathuk senyari bumi, pecahing dhadha wuthahing ludira, sun labuhi taker pati*" — bila dahi kita dicoreng dan sejengkal tanah kita dirampas, maka pecahnya dada dan tumpahnya darah kita hadapi, nyawa taruhannya. Bukankah muka kita sudah tercoreng-moreng tatkala tidak kurang dari 60 buah undang-undang yang kita buat sendiri penuh dengan kepentingan asing yang terdiktakan melalui wakil-wakil rakyat sendiri, sehingga berjengkal-jengkal tanah dan SDA-SDA strategis kita terampas dan terampok asing, sementara ekonom-ekonom kita mewajarkan karena *fake*

*consciousness* (istilah RPD) dan karena ketertundukan kita pada globalisasi yang sesungguhnya tak pernah ramah dan predatorik terhadap yang mudah lengah dan kehilangan *sense of significance*.

Dari situlah Mohammad Hatta (1960) sempat memprihatinkan masalah kepemimpinan dan kemartabatan nasional sehingga mengutip pujangga Jerman, Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805): "*Eine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren, aber der grosse Moment findet ein kleines Geschlecht*" – suatu masa besar dilahirkan abad, tetapi masa besar itu menemui manusia kerdil. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah awal lahirnya masa besar bagi Indonesia, namun belakangan ini kita dapat merasakan bahwa masa besar ini hanya menemui manusia-manusia serba medioker. Inilah suatu kegagalan budaya dari tugas konstitusional kita untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa", suatu artikulasi konsepsi budaya yang jauh melampaui sekadar tugas mencerdaskan otak bangsa, suatu tuntutan budaya untuk berkehidupan yang cerdas dan anggun berharkat martabat, barangkali lebih lanjut juga yang berketahanan nasional, keberanian, digdaya, dst dst, sampai ke tingkat yang mandraguna.



APA yang ditulis oleh RPD yang perlu dicatat oleh para ekonom adalah penolakannya terhadap apa yang oleh ekonom dikenal sebagai *trickle-down mechanism*, yang oleh kaum ekonomi *neoclassical mainstream* diterima dan diwajarkan; sementara ekonom kelompok strukturalis menolaknya karena ketidakadilannya secara partisipatif dan emansipatif terhadap rakyat di bawah, sekaligus mendorong terbentuknya dependensi statis pada pihak yang lemah ke pihak yang kuat. RPD saya perkirakan ikut merasakan

*concern* kaum ekonom strukturalis yang menganggap *trickle-down mechanism* merupakan suatu kejahatan moral. Memang demikian, karena rakyat di bawah dibenarkan hanya berhak menerima tumpahan (*spill-over*) dari ketamakan kapitalisme yang melimpah dan peran superordinasinya. Namun, kaum kapitalis sebaliknya malah dengan congkaknya menganggap bahwa seharusnya rakyat berterima kasih karena kaum pemodal ini telah menyediakan pekerjaan dan di sana-sini mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi dan pekerjaan lebih lanjut (*backward dan forward linkages*), yang sebetulnya malahan *nyirep* semangat membangun gerak kemandirian *bottom-up dan people-based*. Nasib rakyat yang tersubordinasi sekali-kali diperas habis-habisan, sekali-kali dibelaskasihani, "dizakati" melalui sikap caritas filantropis. Oleh karena itu, RPD pun menghujat CSR yang ia katakan merupakan suatu kamufase, suatu *klangenan* atau romantisme petinggi bisnis untuk menutupi kerakusan kapitalisme, yang saya sendiri menyebutnya ibarat topeng kapitalisme yang mempersolek diri dan bergincu *kenès*.

Dari kritiknya terhadap CSR itu, RPD menuntut sikap budaya anggun terhadap para kapitalis, dan menyodorkan suatu obligasi budaya terhadap mereka dengan konsep *Corporate Culture Responsibility* (CCR)-nya. Sementara itu, dalam kaitan dengan kritik terhadap CSR, sebagai upaya meredam kapitalisme, saya sendiri mengajukan konsepsi kebersamaan *Triple-Co* (*co-ownership, co-determination, co-responsibility*) yang hakikatnya adalah pemilikan bersama badan usaha oleh para *clienteles* untuk menukas superioritas permodalan kapitalistik. (Tentu konsepsi Triple-Co tidak untuk dibahas di sini lebih lanjut).

Budayawan penulis buku ini juga memiliki kepekaan ekonomi sebagaimana ekonom terkemuka John Kenneth Galbraith, juga seorang strukturalis, yang mengkritisi

(1958) kecenderungan kehidupan konsumtif yang berlebihan dari kaum kaya dan kaum menengah di Amerika Serikat. Galbraith memprihatinkan pula ketidakpedulian para ekonom terhadap pertanyaan tentang keadilan yang mendasar, mengapa orang miskin tetap miskin (*why the poor are poor*). Bila Galbraith mencemaskan terbentuknya *an affluent society* yang tidak humanistik dan abai terhadap isu tentang ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan makin terbaikannya sektor publik dan jasa-jasa sosial bagi kelompok miskin, maka RPD mencemaskan terjadinya suatu konspirasi perampokan. RPD menuding kepada apa yang ia sebut sebagai "Konspirasi Trio P" - pengusaha-pemerintah-parlemen (yang dilihatnya sebagai trio pemerias) di negeri kita, di mana keinginan-keinginan kaum pemodal diakomodasi oleh pemerintah dan direstui parlemen. Dikatakannya kapitalisme mendorong pemerintah dan parlemen menjadi "*public master*", bukan lagi "*public servant*", bahkan menjadi "*public monster*" terhadap *public sector* dan *public services*, maka penulis buku ini terlepas dari pandangan Galbraith, mengetengahkan paham budaya "ekonomi cukup" (baca: menolak *affluence*), yaitu ekonominya manusia yang tidak materialistik dan tidak hedonistik, yang tidak terjebak oleh hidup konsumtif semata-mata. Itulah barangkali ia maksudkan sebagai kehidupan ekonominya orang-orang *prasaja* yang kebersahajanya dilandasi misi-misi kultural yang secara etik dan estetik terpenuhi dan tidak perlu lebih. Hidup *prasaja* pernah ditetapkan dalam GBHN kita.

Tentu "ekonomi-cukup" yang dimaksudkan RPD (saya yakin) bukanlah ekonomi tanpa semangat kerja-keras, yang tanpa disertai etos kerja produktif melampaui kebutuhan konsumsi secukupnya itu. Kerja-keras untuk menghasilkan surplus sangat diperlukan sebagai modal pembangunan bangsa, sebagai tabungan nasional untuk investasi bagi

generasi mendatang, demi membangun, memugar kerusakan akibat perampokan sumber daya alamnya anak-cucu. Budaya hidup cukup harus berdampingan dengan budaya menabung, gerakan hidup *prasaja* harus berdampingan dengan gerakan memupuk tabungan nasional, dan di situlah kita memangkas sirkel pola ketergantungan yang di dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan dikenal sebagai *the vicious circle of underdevelopment*. Tentu kerja keras memupuk surplus ekonomi adalah demi akumulasi modal untuk meningkatkan ketangguhan bangsa menghadapi lawan yang tak diundang, mematahkan "lingkaran setan" utang negara yang berkelanjutan sebagaimana yang juga dicemaskan oleh RPD di bukunya ini. Di sinilah RPD sempat melihat bahwa manusia seharusnya jauh dari sifat tercelanya sebagai *homo-economicus*, namun sebagai *homo-humanus* yang senantiasa cenderung menolak kesenjangan kehidupan ekonomi yang makin menganga antara yang kaya dan yang miskin.

Barangkali ada yang tertinggal tentang kritik penulis buku ini terhadap kapitalisme. Sebelum ia berbicara mengenai "ekonomi cukup" ada baiknya kita ingat tentang proses pemiskinan (*impoverishment*) terhadap rakyat yang inheren dengan kapitalisme dan mekanisme pasar-bebas bawaannya, sebagai berikut ini: Pembangunan acapkali menjadi proses menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan, yang berkelanjutan menjadi proses *inferiorization*. Modernisasi menjadi westernisasi dengan *conventional wisdom*-nya itu. Orang miskin menjadi makin papa. Rakyat tergusur dari tempat tinggal mereka. Setiap detik terjadi pemindahan pemilikan tanah dari yang miskin ke yang kaya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang makin mahal merupakan "*landrente stelsel*" baru. PBB yang makin mahal menjadi mekanisme operatif pengambil-alihan pemilikan tanah dari yang miskin ke yang kaya. Tanah negeri sebagai Ibu Pertiwi berubah

menjadi barang perniagaan, yang tidak bisa ditempatkan lagi dalam konteks sosial-ideologis dan sosial-kulturalnya Pasal 33 UUD 1945, di mana "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".



MELALUI berbagai tulisan saya baru-baru ini saya mencoba mengingatkan para ekonom untuk lebih sadar membandingkan antara "ekonomi konvensional" dengan apa yang saya sebut sebagai "ekonomi kontemporer" yang relevan dengan pesan-pesan Konstitusi kita. Beberapa perbedaan antara keduanya yang saya garisbawahi adalah bahwa "ekonomi konvensional" menempatkan *modal ekonomi* sebagai yang utama dan diutamakan, memposisikan *modal ekonomi* sebagai yang "sentral-substansial". Sementara, "ekonomi kontemporer" mengutamakan *manusia* sebagai yang utama dan diutamakan, artinya memposisikan *manusia* sebagai yang "sentral-substansial", dan mereduksi posisi *manusia* sebagai yang "marginal-residual" adalah suatu malapetaka dan kejahatan moral.

Perlu digarisbawahi pula di sini bahwa ilmu ekonomi konvensional memberi corak pada manusia sebagai *homo-economicus* berikut pamrih-pribadi (*self-interest*)-nya, sedangkan ekonomi kontemporer memberi corak pada manusia sebagai *homo-ethicus*, *homo-humanus*, *homo-socius*, dan *homo-magnificus* (*homo-Khalifatullah*). Di sinilah puncak dari kritik budaya sebenarnya terhadap kapitalisme itu. Oleh karena itu, seperti saya katakan di awal sambutan ini, saya menyarankan agar buku RPD ini dibaca oleh para dosen ilmu ekonomi, agar lebih mampu *unlearning* meninggalkan *capitalistic mainstream classical economics* sebagai ilmu ekonomi konvensional yang ketinggalan zaman, tidak sesuai

dengan panggilan sejarah. Melalui berbagai tulisan, saya telah mencoba menguraikan dan menegaskan bahwa Sistem Ekonomi Konstitusi berdasar Demokrasi Ekonomi Indonesia sebenarnya adalah ilmu ekonomi kontemporer. Dengan memahami tuntutan kontemporer ini, maka akan jelas bagi kita, mengapa kapitalisme yang predatorik yang digalang para liviathan bisnis dan para imperialis *Herrenvolk* telah menjadi suatu ortodoksi peradaban mondial, suatu komidi global yang absolut. Di sini saya menyanggah "*the end of history*"-nya Francis Fukuyama (1992) yang menyatakan "*Western liberal democracy* (yang tentu inheren dengan kapitalisme, *pen.*) *as the final form of human government*". Bagi Indonesia demokrasi menggelar partisipasi politik dan emansipasi politik, dan demokrasi ekonomi menggelar partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Keduanya adalah *consociational*, dengan titik-tolak kebersamaan, mencapai konsensus berdasar musyawarah, untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.

Bila ada paradigma baru mengenai ilmu ekonomi saat ini diperlukan, paradigma baru itu adalah: (1). Meninggalkan titik-tolak manusia sebagai *homo-economicus*, menuju *homo-ethicus*, *homo-socius*, *homo-religious* dan *homo-humanus*. (2). Dalam perekonomian manusia (umat) yang harus diperankan dalam posisi "sentral-substansial" tidak boleh direduksi oleh pemodal menjadi sekadar "marginal-residual". (3). Menegaskan *the end of laissez-faire*, menegaskan bahwa pasarnya Adam Smith (*the invisible hand* - tangan ajaib tak nampak) lebih banyak gagal daripada berhasil untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural yang menjadi misi kaum strukturalis. Ketimpangan-ketimpangan struktural justru dipertajam dengan berlakunya stelsel *laissez-faire*. (4). Menisbikan atau menafikan kultur bersaing bebas (*competitivism*) sebagai titik-tolak kompetitivisme

perlu diredam dan dipadukan dengan kooperativisme dalam konteks ekonomi humanistik. (5). Meninggalkan asas perorangan (*self interest*) menegakkan asas bersama (*mutual interest*), menghidupkan kembali kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai tuntutan dunia baru setelah runtuhnya Tembok Berlin (1989) *Ode an die Freude* diteriakkan yang menegaskan *alle Menchen werden Bruder* – mengukuhkan *the brotherhood of men*. (6). Mengunggulkan "daulat rakyat" dan meminggirkan "daulat pasar", artinya dalam pembangunan yang dibangun adalah rakyat, bukan modal, pembangunan ekonomi perlu diposisikan sebagai derivat dari pembangunan rakyat, bangsa dan negara. (7). Perubahan paradigma berlanjut dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembagian yang lebih merata dari pertumbuhan ekonomi itu, menjadi berorientasi pada pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia, artinya tidak lagi pembangunan adalah hanya untuk mencapai peningkatan "nilai-tambah ekonomi", namun juga sekaligus meningkatkan "nilai-tambah sosial kultural". Demikian itulah sebabnya, maka kita harus selalu mengacu Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 bahwa "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". (8). Tidak mengabaikan pendekatan institusi, bahwa ilmu ekonomi menampung pesan Konstitusi, mengemban cita-cita dan mimpinya masyarakat, menampung kearifan lokal yang membahagiakan rakyat, menggelar Indonesianisasi melalui modernisasi yang bukan westernisasi. Ini berarti membangun dan mengembangkan ilmu amaliah dalam beramal ilmiah, berarti sekaligus menegaskan perlu diakhirinya "*Wertfreiheit der Wissenschaft*" (*the end of neutrality of science*). (9). Pembangunan memperoleh definisi barunya pula, yaitu proses meningkatnya kemampuan rakyat (Sen), oleh karena itu strategi pembangunan tidak saja (Kotari) sekadar untuk

mencukupi kebutuhan hidup massa rakyat, tetapi massa rakyat itu sendiri haruslah produsen-produsennya. (10). Para ahli ekonomi syariah harus pula ahli ekonomi umum dan sekaligus ekonomi kontemporer, sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan dengan lebih substantif mampu mengantar Ilmu Ekonomi Syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat.

Sebagai catatan pinggir untuk butir (10) di atas, perlu saya kutipkan artikel lama saya sebagai berikut: "...sebenarnya Ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan sebagai Ekonomi Syariah, keduanya *compatible* meskipun tidak sepenuhnya *substitutable*...Namun *compatibility* Ekonomi Syariah terhadap Ekonomi Pancasila akan makin surut apabila (seperti sedang populer saat ini) Ekonomi Syariah direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi, yang membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang sedang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious* ini...".

Sebagai penutup, perlu saya kemukakan di sini: menurut catatan saya sudah lima kali ditegaskan perlunya mengakui *the end of laissez-faire*. Pertama kali oleh tokoh besar John Maynard Keynes (1926); kedua oleh Mohammad Hatta, Karl Polanyi (1934 dan 1944); ketiga oleh Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran, dll (1957-

1960); dan keempat oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz, dll (1990-2002). Intinya adalah bahwa pasar tidaklah *self-regulating*, tidak *self-correcting*, penuh *market failures*, terutama dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Para Nobel laureates 2007 (Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson); 2008 (Paul Krugman); 2009 (George Akerlof) barangkali sebagai penegas kelima yang mendukung *the end of laissez-faire*.

Lalu mengapa tiap kali *the end of laissez-faire* ditegaskan, setiap kali ia muncul kembali? Jawabnya: kapitalisme tidak bisa hidup tanpa *laissez-faire*, ibarat ikan tidak bisa hidup tanpa air. Kapitalisme adalah insting manusia rakus yang tidak mudah dimatikan.

Tanpa pergeseran-pergeseran paradigma di atas, maka yang terbentuk adalah sistem ekonomi yang eksploitatif dan ribawi, yang secara tegas ditentang oleh Konstitusi dan falsafah dasar negara kita, maka kita juga akan terjebak oleh *conventional wisdom* obsolut yang dicemaskan Galbraith sejak 55 tahun lalu yang lalu.

Selamat membaca pandangan budaya substantif dalam buku karya RPD ini. ❀

Jakarta, 14 Juli 2014

## Pendahuluan

# EKONOMI YANG MENKHIANATI DIRI

Sebenarnya cukup lama sudah terjadi koreksi atau penolakan terhadap sistem ekonomi neoliberal, sebagaimana para pengamat menjustifikasi sistem yang berlaku sekarang ini. Sejak Prof. Sarbini di akhir 1960-an, Prof. Mubyarto di tahun 1980-an, dan di belakangan hari disuarakan cukup keras juga oleh calon presiden independen, Rizal Ramli, lewat Econit, *think tank* yang dipimpinnya, maupun oleh banyak pemikir kritis lainnya.

Pada suhu panas Jakarta dan negeri yang dimasak oleh jargon dan nafsu politik belakangan ini, sempat muncul sedikit polemik tentang *new socialism* dari beberapa pendukung muda seperti Rocky Gerung, Budiman Sudjatmiko dan Fadjroel Rahman. Sebuah tulisan pun muncul di harian *Kompas*, dari pengajar Sekolah Tinggi Filsafat, Herry B. Priyono, yang "Mempertanyakan Kembali Kapitalisme".